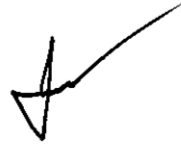





	<p align="center">SOP POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT</p>	Nomor SOP	002/SOP/POLTEKPEL SUMBAR-PPM/06/2022
		Tgl. Ditetapkan	08/06/2020
		Tgl. Revisi	23/06/2022
		Tgl. Diberlakukan	23/06/2022
		Ditetapkan Oleh	<p align="center">DIREKTUR POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT</p>  <p align="center"><u>Capt. WISNU RISIANTO, M.M.</u> Pembina Tk.I (IV/b) 19710202 199808 1 001</p>
ISO 9001:2015			
Dasar Hukum :		Cara Mengatasi :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 6. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 108 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; 7. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 67 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; 8. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 50 Tahun 2017 Tentang pedoman penyusunan peta proses bisnis dan standar operasional prosedur di lingkungan kementerian perhubungan; 9. Peraturan Menteri Perhubungan RI PM 140 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Laut; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah; 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/60/M.PAN/6/2005 tentang perubahan atas ketentuan lampiran I dan atau lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang jabatan fungsional dan angka kreditnya; 12. Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 225 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; 13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 36/D/O/2001 tentang petunjuk teknis pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan dosen; 14. Keputusan Menkowsabangpan Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus tentang Jabatan Dosen dan Angka Kreditnya; 15. Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 61409/MPK/KP/1999 dan 181; 16. STCW No. 1978 dan Amandemennya; 17. ISO 9001:2015, Klausul 7.5.3. Pengendalian Informasi Terdokumentasi, Klausul 8.5. Pengendalian Produksi dan Jasa. 		<p>Dilakukan kegiatan penyusunan pedoman standar pedoman penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan SOP dan peraturan perundang - undangan yang ada.</p> <div align="center" data-bbox="933 991 1377 1176">  </div>	

Keterkaitan : 1. Pedoman Mutu Poltekel Sumbar; 2. SOP Pengendalian Informasi Terdokumentasi.	Peralatan : 1. Komputer; 2. Printer; 3. Jaringan Internet.
Peringatan : Apabila SOP Penyusunan Pedoman Standar Pedoman penelitian dan pengabdian masyarakat tidak dilaksanakan maka penerapan SOP di lapangan mengalami kendala dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	

SOP PENYUSUNAN PEDOMAN STANDAR PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

NO.	URAIAN JENIS KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET.
		DIREKTUR	PPPM	PRODI	PEJABAT TERKAIT	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Melakukan Persiapan penyusunan pedoman					Dokumen pendukung	2 Hari	Soft Copy	
2	Melakukan Penulisan/ Penyusunan PPPM					Draft Pedoman	7 Hari	Hard Copy dan soft Copy	
3	Mengintruksikan untuk melakukan Pengecekan					Draft Pedoman	2 Hari	Pedoman	
4	Melakukan Pengesahan pedoman PPPM					Draft Pedoman	1 Hari	Soft Copy dan Hard Copy Pedoman	

RIWAYAT PERUBAHAN SOP PENYUSUNAN PEDOMAN STANDAR PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

NO.	ISI PERUBAHAN	TANGGAL BERLAKU
1	<p>Perubahan Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja <u>Politeknik Pelayaran Sumatera Barat</u></p> <p>Perubahan Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat</p> <p>Perubahan tanda tangan pengesahan SOP sesuai SK Nomor 2763 tahun 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.</p>	23/06/2022